

Berita Lingkungan Hidup

Korban Mafia Tambang Mengadu ke Satgas

Korban mafia tambang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengadukan dugaan praktik mafia ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum di Kantor Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), Jakarta, Kamis (29/4). Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Solikin melaporkan tujuh kasus sekaligus modus operandinya yang marak terjadi di wilayah tambang batu bara di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Kasus-kasus tersebut diduga kuat melibatkan pengusaha nakal, pemerintah daerah, serta oknum kepolisian. Di antaranya tentang izin Kuasa Pertambangan (KP) yang tumpang tindih yang dikeluarkan kepala daerah, pembiaran eksploitasi di kawasan hutan oleh penegak hukum, dan penyerobotan lahan.

Solikin berharap Satgas dapat menuntaskan kasus mafia ini, terlebih aksi ini merugikan negara karena adanya manipulasi pajak dan royalti yang berimbas pada penerimaan negara. "Masyarakat Kalimantan Selatan sudah lelah dengan kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum. Institusi kepolisian dicoreng oleh cukong-cukong jahat dan tidak bertanggung jawab," katanya.

Kasus yang diadukan antara lain yang menimpa Intan Sari, pemilik CV Indo Sraya Putra. Pada 2004, Kepolisian Tanah Bumbu menyerobot wilayah tambang perusahaan tersebut untuk dibuat Markas Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanpa pemberitahuan dan ganti rugi. Kasus ini lalu dibawa ke pengadilan, kemudian pengadilan memenangkan Intan.

Namun yang terjadi selanjutnya, Intan justru menjadi bulan-bulanan oknum kepolisian. Ia dan keluarganya sering didatangi preman dan oknum kepolisian yang mengancam dengan kekerasan.

"Kami sudah tidak tenang mengelola kekayaan negara," kata Intan.

Ia menyatakan, banyak aksi mafia di wilayah Tanah Bumbu yang dilakukan pengusaha berinisial HI. Aksinya berjalan mulus karena didukung petinggi di Markas Besar Kepolisian RI.

Intan menambahkan bahwa sering menemukan aparat penegak hukum yang menambang tanpa izin. "Mereka menambang tanpa izin di pinggir jalan dan di siang hari bolong, tidak apa-apa," katanya.

Aksi mafia pertambangan lain yang dilaporkan adalah pungutan liar oleh oknum-oknum kepolisian dan pemerintah daerah. Intan menyatakan, setiap hari oknum-oknum kepolisian meminta pungutan liar dari setiap ton batu bara yang diproduksi. Jumlah pungutan beragam tergantung pangkat oknum yang meminta, mulai dari Rp20 ribu hingga Rp10 ribu per ton batu bara.

Sekretaris Satgas Denny Indrayana mengakui aksi mafia pertambangan sangat membahayakan karena melibatkan banyak mafia lain. Ada mafia tambang, hutan, tanah dan peradilan. Kalau sudah bertaut menjadi sangat berbahaya. Berlipat-lipat bahayanya dan perlu diterbitkan.

Ia memastikan mafia pertambangan merupakan salah satu target operasi Satgas. "Saya merasa ini salah satu *big fish*," katanya. n **Rizky Andriati Pohan**